

PENGUATAN PERAN MUI DALAM LITERASI DIGITAL BAHAYA RADIKALISME GUNA MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

Dr. M. Ihsan, S.Ag., SH., MH., M.Si

Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Email: m_ihsan@uhamka.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital di Indonesia telah meningkatkan penetrasi internet hingga mencapai 80,66% (APJII, 2025) dari total populasi nasional. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap perkembangan teknologi informasi, namun pada saat yang sama juga melahirkan ancaman baru berupa penyebaran radikalisme melalui ruang siber. Generasi muda, khususnya Gen Z, menjadi kelompok yang paling rentan terpapar propaganda radikal melalui media sosial, platform video pendek, game online, dan aplikasi percakapan digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penguatan peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam literasi digital (Gilster, 1997) mengenai bahaya radikalisme guna memperkuat Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024). Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi, fatwa MUI, laporan pemerintah, dan data kelembagaan yang terdapat dalam Kertas Kerja Perorangan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) XXVII Lemhannas RI Tahun 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ancaman radikalisme digital semakin meningkat seiring rendahnya literasi digital masyarakat dan dominasi narasi keagamaan eksklusif di ruang siber. MUI memiliki legitimasi moral (LSI, 2023) dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai otoritas keagamaan nasional, namun implementasi dakwah digital moderat masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan melalui transformasi digital MUI, integrasi literasi digital keagamaan nasional, penguatan dai siber, sistem deteksi dini narasi radikal, perlindungan generasi muda berbasis keluarga dan komunitas, serta penguatan regulasi ruang siber. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan imunitas kognitif masyarakat terhadap ideologi radikal dan memperkuat Ketahanan Nasional Indonesia.

Kata Kunci: Literasi Digital, Radikalisme Siber, MUI, Ketahanan Nasional. Moderasi Beragama.

ABSTRACT

Digital transformation in Indonesia has increased internet penetration to 80.66% of the national population. This condition has provided positive impacts on information technology development, but at the same time has created new threats in the form of radicalism dissemination through cyberspace. Young people, especially Generation Z, are the most vulnerable group exposed to radical propaganda through social media, short-video platforms, online games, and digital communication applications. This study aims to analyze the strengthening of the role of the

Indonesian Ulema Council (MUI) in digital literacy regarding the dangers of radicalism in order to strengthen National Resilience. The study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review of official documents, MUI fatwas, government reports, and institutional data contained in the Individual Working Paper of the National Leadership Consolidation Education (P3N) XXVII Lemhannas RI 2026. The results indicate that the threat of digital radicalism is increasing due to low public digital literacy and the dominance of exclusive religious narratives in cyberspace. MUI possesses moral legitimacy and a high level of public trust as a national religious authority; however, the implementation of moderate digital preaching remains suboptimal. Therefore, strengthening strategies are needed through MUI digital transformation, integration of national religious digital literacy, strengthening cyber preachers, early warning systems for radical narratives, youth protection based on family and community, and strengthening cyberspace regulations. These strategies are expected to improve society's cognitive immunity against radical ideologies and strengthen Indonesia's National Resilience.

Keywords: Digital Literacy, Cyber Radicalism, MUI, National Resilience, Religious Moderation.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Transformasi digital di Indonesia telah mencapai perkembangan yang sangat signifikan dengan tingkat penetrasi internet sebesar 80,66% (APJII, 2025) atau mencakup sekitar 229,4 juta jiwa dari total populasi nasional pada periode 2025–2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang digital telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadikan media sosial sebagai sarana utama dalam memperoleh informasi, berinteraksi, dan membentuk pandangan sosial maupun keagamaan.

Kelompok Gen Z dan milenial menjadi pengguna internet terbesar di Indonesia. Dominasi generasi muda dalam penggunaan internet menciptakan peluang besar bagi penguatan edukasi dan integrasi nasional. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran ideologi radikal dan intoleransi melalui ruang siber. Media sosial, platform video pendek, aplikasi percakapan, hingga game online telah menjadi sarana efektif bagi kelompok ekstremis dalam menyebarkan propaganda dan melakukan rekrutmen ideologis.

Fenomena radikalisme digital semakin mengkhawatirkan karena didukung oleh rendahnya literasi digital (Gilster, 1997) masyarakat, khususnya dalam aspek keamanan digital dan kemampuan menyaring informasi. Dalam konteks psikologis, muncul fenomena Online Disinhibition Effect (Suler, 2004) yang menyebabkan individu lebih mudah terpengaruh oleh ujaran kebencian, kekerasan, dan propaganda radikal ketika berada di ruang digital dibandingkan dalam interaksi langsung.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga keagamaan nasional memiliki posisi strategis dalam membangun moderasi beragama dan memperkuat imunitas ideologis masyarakat. MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 (Majelis Ulama Indonesia, 2017) tentang Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dan Fatwa Tahun 2003 tentang Terorisme (Majelis Ulama Indonesia, 2003). Namun demikian, implementasi dakwah digital dan sosialisasi nilai-nilai

moderasi beragama masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya dalam menjangkau generasi muda di ruang siber.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan ideal dengan kenyataan di lapangan. Narasi moderasi beragama belum mampu mendominasi ruang digital secara efektif, sementara kelompok radikal terus memanfaatkan algoritma media sosial untuk menyebarkan propaganda secara masif. Oleh karena itu, penguatan peran MUI dalam literasi digital (Gilster, 1997) menjadi kebutuhan mendesak guna memperkuat Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024) Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana penguatan peran MUI dalam literasi digital mengenai bahaya radikalisme guna memperkuat Ketahanan Nasional?”

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dinamika radikalisme digital di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan peran MUI dalam literasi digital.
3. Merumuskan strategi penguatan peran MUI dalam menangkal radikalisme digital guna memperkuat Ketahanan Nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen resmi, fatwa MUI, laporan pemerintah, data lembaga negara, dan kajian akademik yang terdapat dalam Kertas Kerja Perorangan P3N XXVII Lemhannas RI Tahun 2026.

Pendekatan penelitian menggunakan analisis Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024) melalui perspektif Asta Gatra, didukung dengan analisis SWOT dan PESTLE untuk memetakan faktor internal dan eksternal dalam penguatan peran MUI di ruang digital.

KERANGKA TEORI

Teori Literasi Digital

Paul Gilster (Gilster, 1997) menjelaskan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara kritis dan efektif. Literasi digital menjadi instrumen penting dalam membangun daya tahan masyarakat terhadap manipulasi informasi dan propaganda radikal.

Teori Online Disinhibition Effect (Suler, 2004)

John Suler (Suler, 2004) menjelaskan bahwa individu di ruang digital cenderung lebih berani, lebih agresif, dan lebih terbuka dibandingkan di dunia nyata karena adanya anonimitas dan minimnya kontrol sosial. Fenomena ini menjadi salah satu faktor meningkatnya penyebaran ujaran kebencian dan radikalisme di media sosial.

Teori Echo Chamber Effect

Cass R. Sunstein (Sunstein, 2018) menjelaskan bahwa media digital menciptakan ruang gema (echo chamber) yang menyebabkan individu hanya menerima informasi yang sejalan dengan pandangannya. Algoritma media sosial memperkuat proses radikalisasi karena pengguna terus menerima konten yang memperkuat ideologi tertentu.

Konsep Islam Wasathiyah

Konsep Islam Wasathiyah (Tim Kementerian Agama RI, 2019) menekankan prinsip keseimbangan, toleransi, keadilan, dan moderasi dalam kehidupan beragama. Konsep ini menjadi landasan penting bagi MUI dalam membangun kontra-narasi terhadap paham radikal dan ekstremisme.

Konsep Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024) merupakan kondisi dinamis bangsa yang meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi dan mengandung kemampuan bangsa dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun luar negeri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Radikalisme Digital di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran radikalisme dari pendekatan konvensional menjadi pendekatan digital. Kelompok radikal memanfaatkan media sosial, platform video pendek, game online, dan aplikasi percakapan terenkripsi untuk menyebarkan propaganda serta melakukan rekrutmen ideologis.

Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 ditemukan lebih dari 21.199 konten (BNPT, 2025) bermuatan radikalisme dan intoleransi di ruang digital Indonesia. Bahkan terdapat 112 anak di 26 provinsi yang teridentifikasi terpapar paham radikal melalui media sosial dan game online.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang siber telah menjadi medan perang ideologi yang sangat berbahaya bagi generasi muda. Kelompok radikal memanfaatkan kelemahan literasi digital (Gilster, 1997) masyarakat serta algoritma media sosial untuk membangun pengaruh secara sistematis.

Ancaman Radikalisme terhadap Ketahanan Nasional

Radikalisme digital tidak hanya menjadi ancaman keamanan siber, tetapi juga mengancam Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024) dalam berbagai dimensi.

1. Gatra Ideologi

Penyebaran ideologi transnasional dan narasi anti-Pancasila melalui media sosial dapat melemahkan ideologi bangsa dan memicu polarisasi sosial.

2. Gatra Sosial Budaya

Meningkatnya ujaran kebencian, intoleransi, cyber bullying, dan polarisasi identitas telah mengikis nilai-nilai gotong royong, toleransi, dan budaya musyawarah.

3. Gatra Pertahanan dan Keamanan

Fenomena lone wolf dan self-radicalization (Sageman, 2008) menunjukkan bahwa ancaman terorisme kini berkembang tanpa struktur organisasi formal yang mudah dideteksi.

Problematika Literasi Digital Masyarakat

Meskipun penetrasi internet terus meningkat, kualitas literasi digital (Gilster, 1997) masyarakat Indonesia masih relatif rendah. Pilar keamanan digital menjadi aspek terlemah dalam Indeks Literasi Digital Indonesia.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat rentan terhadap hoaks, disinformasi, propaganda radikal, dan manipulasi algoritma media sosial. Generasi muda sering kali tidak mampu membedakan antara dakwah moderat dengan propaganda radikal yang dikemas secara menarik dan emosional.

Posisi Strategis MUI dalam Ruang Digital

MUI memiliki legitimasi moral (LSI, 2023) dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi sebagai lembaga otoritatif keagamaan nasional. Dalam survei kepercayaan publik, MUI menempati posisi penting sebagai rujukan keagamaan masyarakat Indonesia.

MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa terkait radikalisme dan etika bermedia sosial, di antaranya:

1. Fatwa MUI Tahun 2003 tentang Terorisme.
2. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial.

Namun demikian, efektivitas dakwah digital MUI masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain:

1. Konten dakwah yang masih formal dan kurang interaktif.
2. Keterbatasan sumber daya digital.
3. Rendahnya optimalisasi media sosial.
4. Kurangnya kader dai siber.
5. Belum terintegrasinya sistem kontra-narasi digital.

Analisis SWOT Penguatan Peran MUI

Strengths (Kekuatan)

1. Memiliki legitimasi moral (LSI, 2023) dan kepercayaan publik tinggi.

2. Memiliki jaringan kelembagaan nasional hingga daerah.
3. Memiliki otoritas keagamaan yang kuat.
4. Memiliki pengalaman dalam moderasi beragama.

Weaknesses (Kelemahan)

1. Kapasitas digital masih terbatas.
2. Konten dakwah belum adaptif terhadap generasi muda.
3. Belum optimalnya sistem pengelolaan media digital.
4. Keterbatasan SDM dai siber.

Opportunities (Peluang)

1. Tingginya pengguna internet dan media sosial.
2. Dukungan pemerintah terhadap moderasi beragama.
3. Kolaborasi lintas sektor dengan BNPT, Komdigi, dan lembaga pendidikan.
4. Perkembangan teknologi digital.

Threats (Ancaman)

1. Masifnya propaganda radikal.
2. Algoritma media sosial yang memperkuat echo chamber (Sunstein, 2018).
3. Penyebaran hoaks dan disinformasi.
4. Fenomena self-radicalization (Sageman, 2008).

Strategi Penguatan Peran MUI

1. Transformasi Digital MUI Nasional

MUI perlu melakukan transformasi digital secara menyeluruh melalui penguatan infrastruktur media digital, optimalisasi media sosial, serta pengembangan platform dakwah berbasis multimedia.

Transformasi digital tersebut harus mampu menghadirkan dakwah moderasi beragama yang komunikatif, kreatif, dan relevan dengan karakteristik generasi muda.

2. Integrasi Literasi Digital Keagamaan Nasional

MUI perlu bekerja sama dengan pemerintah, lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi masyarakat dalam menyusun program literasi digital (Gilster, 1997) keagamaan nasional.

Program tersebut harus mencakup:

1. Pendidikan etika bermedia sosial.
2. Pencegahan hoaks dan propaganda radikal.
3. Penguatan moderasi beragama.
4. Penguatan wawasan kebangsaan.

3. Penguatan SDM Dai Siber dan Influencer Moderat

MUI perlu melakukan kaderisasi dai siber yang memiliki kemampuan komunikasi digital, pemahaman moderasi beragama, dan kemampuan memproduksi konten kreatif.

Kehadiran influencer moderat menjadi penting untuk menyaingi dominasi konten radikal di media sosial.

4. Sistem Deteksi Dini dan Respons Cepat Narasi Radikal

MUI bersama BNPT, Polri, dan Kementerian Komunikasi dan Digital perlu membangun sistem deteksi dini terhadap penyebaran propaganda radikal di media sosial.

Sistem tersebut dapat digunakan untuk:

1. Monitoring konten radikal.
2. Kontra-narasi digital.
3. Edukasi masyarakat.
4. Pencegahan rekrutmen ideologis.

5. Perlindungan Generasi Muda Berbasis Keluarga dan Komunitas

Keluarga dan komunitas memiliki peran penting dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda.

MUI perlu memperkuat program edukasi keluarga mengenai:

1. Literasi digital.
2. Bahaya radikalisme.
3. Etika bermedia sosial.
4. Moderasi beragama.

6. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola Ruang Siber

Penguatan regulasi diperlukan untuk memastikan ruang digital tidak digunakan sebagai sarana penyebaran propaganda radikal.

Sinergi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sipil menjadi penting dalam menciptakan ruang siber yang sehat dan aman.

PENUTUP

Simpulan

Transformasi digital di Indonesia telah menghadirkan tantangan serius berupa penyebaran radikalisme melalui ruang siber. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap propaganda radikal akibat rendahnya literasi digital dan dominasi narasi eksklusif di media sosial.

MUI memiliki posisi strategis sebagai lembaga keagamaan nasional dengan legitimasi moral dan tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Namun demikian, peran MUI dalam dakwah digital dan

literasi digital masih perlu diperkuat agar mampu menghadapi perkembangan ancaman radikalisme siber.

Penguatan peran MUI dapat dilakukan melalui transformasi digital kelembagaan, integrasi literasi digital keagamaan nasional, penguatan dai siber, sistem deteksi dini narasi radikal, perlindungan generasi muda berbasis keluarga dan komunitas, serta penguatan regulasi ruang siber.

Implementasi strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan imunitas kognitif masyarakat, memperkuat moderasi beragama, dan memperkokoh Ketahanan Nasional Indonesia.

Rekomendasi

1. MUI perlu membangun pusat literasi digital anti-radikalisme nasional.
2. Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan MUI dalam kontra-narasi digital.
3. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan literasi digital dan moderasi beragama dalam kurikulum.
4. Platform media sosial perlu memperkuat pengawasan terhadap propaganda radikal.
5. Keluarga dan masyarakat perlu dilibatkan dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Laporan Survei Penetrasi Internet Indonesia 2025–2026. Jakarta: APJII, 2025.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Analisis Sebaran Radikalisme pada Kelompok Usia Rentan di Media Sosial 2025. Jakarta: BNPT, 2025.
- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Laporan Tahunan Potensi Radikalisme di Indonesia 2024. Jakarta: BNPT, 2024.
- Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Laporan Tahunan Keamanan Siber Indonesia: Ancaman Konten Radikal. Jakarta: BSSN, 2024.
- Gilster, Paul. Digital Literacy. New York: Wiley Computer Publishing, 1997.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Indeks Literasi Digital Indonesia 2024–2025. Jakarta: Kemenkomdigi, 2025.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Laporan Tahunan Penanganan Konten Bermuatan Negatif 2024. Jakarta: Kemenkominfo RI, 2024.
- Lembaga Survei Indonesia (LSI). Survei Opini Publik: Kepercayaan Masyarakat terhadap Lembaga Keagamaan. Jakarta: LSI, 2023.
- Lemhannas RI. Modul Bidang Studi Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024). Jakarta: Lemhannas RI, 2024.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa MUI Tahun 2003 tentang Terorisme. Jakarta: Sekretariat MUI, 2003.

Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 (Majelis Ulama Indonesia, 2017) tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Jakarta: Komisi Fatwa MUI, 2017.

McLuhan, Marshall. *Understanding Media: The Extensions of Man*. Cambridge: MIT Press, 1994.

PPIM UIN Jakarta. *Riset Moderasi Beragama di Dunia Digital*. Jakarta: PPIM, 2023.

Sageman, Marc. *Leaderless Jihad: Terror Networks in the Twenty-First Century*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2008.

Sunstein, Cass R. *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton: Princeton University Press, 2018.

Suler, John. "The Online Disinhibition Effect (Suler, 2004)." *CyberPsychology & Behavior*, Vol. 7, No. 3, 2004.

Suryohadiprojo, Sayidiman. *Ketahanan Nasional (Lemhannas RI, 2024) Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1997.

Tim Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.

We Are Social & Meltwater. *Digital 2025: Indonesia Global Digital Statshot*. London: We Are Social, 2025.